

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pandemi *COVID-19* merupakan *global pandemic* yang dinyatakan sebagai bencana non-alam oleh Presiden Joko Widodo melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-alam Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 (*COVID-19*) sebagai Bencana Nasional yang masih menjadi perhatian pemerintah Indonesia hingga saat ini sebab menimbulkan efek kompleksitas dan implikasi cukup tinggi terhadap mobilitas di berbagai aspek yang luas di Indonesia. Sektor ketenagakerjaan merupakan sektor yang cukup terdampak *COVID-19*. Penyebaran laju *COVID-19* yang begitu cepat mendorong pemerintah untuk mengambil langkah guna melakukan tindakan preventif melalui segala bentuk kebijakan, instruksi dan metode dalam menggalakkan upaya percepatan penanganan dan pencegahan penyebaran *COVID-19* dengan tujuan untuk menekan kembali perekonomian dari berbagai sudut (*kompaspedia.kompas.id*, n.d.).

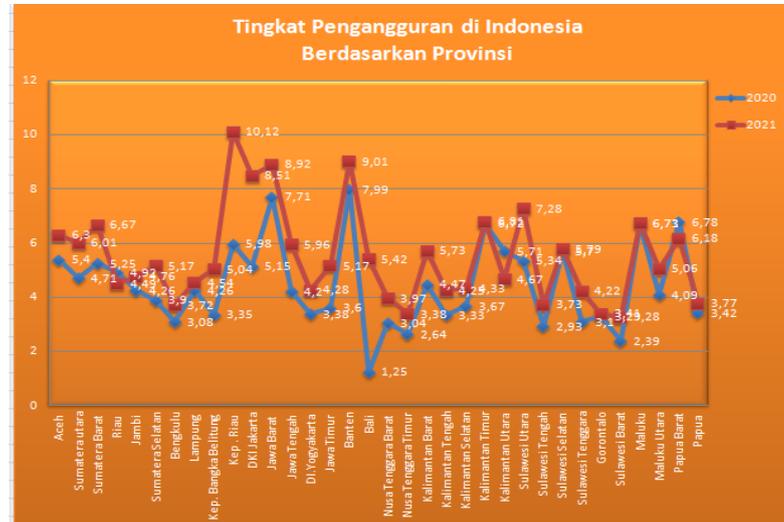
Salah satu kebijakan yang dibuat pemerintah dan diterapkan di wilayah Indonesia berpengaruh besar terhadap laju perekonomian adalah Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020. Kebijakan PSBB yang diimplementasikan di beberapa wilayah Indonesia berdampak pada penurunan pendapatan

ekonomi di seluruh lapisan masyarakat terutama buruh, karyawan dan pegawai swasta. Sehingga dari hal tersebut, tidak sedikit perusahaan yang sanggup untuk melanjutkan produktivitas usaha dan mendesak perusahaan untuk melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap para pekerja. Walaupun dalam jangka pendek, dampaknya pada kesehatan dapat menurunkan angka positif namun pada sektor ketenagakerjaan meningkatkan pemutusan hubungan kerja (PHK). Maraknya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat dan menurunkan absorpsi tenaga kerja yang memicu terjadinya kenaikan angka pengangguran dan menyebabkan ketimpangan pendapatan yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Pasalnya, para pekerja di sektor informal memiliki daya tahan ekonomi yang relatif rentan apalagi para pekerja yang bergantung pada penghasilan harian (*Ekonomi Bisnis.com, t.t.*).

Berdasarkan informasi yang dikutip dari Badan Pusat Statistik, tingkat pengangguran terbuka di Indonesia dalam sejumlah provinsi terhitung sebesar 6,26% pada Februari 2021 naik 1,32% dari Februari tahun 2020. Artinya terdapat kenaikan jumlah pengangguran pada bulan Februari sebanyak 8,75 juta jiwa. Kenaikan angka pengangguran ini disebabkan oleh belum usainya pandemi *COVID-19* di Indonesia. Wabah ini memukul banyak sektor yang menyebabkan terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK). Grafik berikut menunjukkan jumlah angka pengangguran di wilayah Indonesia berdasarkan Provinsi tahun 2020-2021 dalam persen (*Badan Pusat Statistik 2021, n.d.*).

Grafik 1

Tingkat Pengangguran di Indonesia Berdasarkan Provinsi



Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah penulis), 2021

Secara presentase, pada bulan Februari 2020 hingga Februari 2021 angka pengangguran terus mengalami kenaikan di sejumlah provinsi di Indonesia. Kenaikan angka pengangguran yang signifikan terjadi karena tahun 2021 masalah pandemi semakin pelik, sehingga pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk menurunkan kasus *COVID-19* di Indonesia dimana kebijakan tersebut mempengaruhi perekonomian masyarakat. Adapun jumlah keseluruhan penduduk usia kerja di Indonesia yang terdampak *COVID-19* yaitu 4,23 juta jiwa, yang terdiri atas pengangguran akibat *COVID-19* sejumlah 318,61 ribu jiwa, 112,43 ribu jiwa bukan angkatan kerja yang terdampak *COVID-19*, sementara yang tidak bekerja akibat *COVID-19* sekitar 252,57 ribu orang (*Badan Pusat Statistik 2021, n.d.*).

Jika dilihat berdasarkan data persentase diatas jumlah kenaikan PHK di sejumlah provinsi menjelaskan, bahwa angkatan kerja mengalami penambahan

jumlah pengangguran yang disebabkan adanya PHK. Salah satu provinsi yang cukup signifikan dalam peningkatan jumlah pengangguran selama tahun 2020-2021 adalah provinsi Kepulauan Riau yang menaikkan angka pengangguran mencapai 10,12% tentu kenaikan angka ini melampaui rerata angka pengangguran nasional yang sebesar 6,49% (*Badan Pusat Statistik, t.t.*). Selain Kepulauan Riau provinsi Jawa Barat, Banten, Jakarta, Sulawesi Utara, Maluku, Kalimantan Timur dan Sumatera barat juga mencapai angka di atas rerata pengangguran nasional (*Badan Pusat Statistik, 2021 t.t.*)

Dari data diatas Provinsi Jawa Timur menduduki peringkat ke-7 pada tingkat kasus pengangguran di Indonesia. Meskipun Jawa Timur tidak melampaui angka rerata pengangguran nasional tetapi tingkat pengangguran terbuka di Jawa Timur juga naik sebesar 2,34% dari tahun 2020. Tahun 2021 jumlah pengangguran naik sebanyak 154,08 ribu orang. Dikeluarkannya peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Virus Disease 2019 (COVID-19)* membuat aktivitas sosial ekonomi masyarakat berubah segala kegiatan di batasi seperti transportasi, pusat perbelanjaan, serta pariwisata. Keadaan ini tentu berdampak terhadap ekonomi masyarakat termasuk keberlangsungan pekerjaan dan penurunan pendapatan masyarakat. Pada tahun 2020 angka pengangguran di Jawa Timur sebesar 3,60% dan mengalami kenaikan pada tahun 2021 sebesar 1,57% dengan jumlah 5,17%. Tentu kenaikan angka ini disebabkan oleh situasi dampak pandemi *COVID-19*

terlebih angka pengangguran di Sidoarjo masih menjadi data tertinggi di Jawa Timur (*Badan Pusat Statistik, 2021 t.t.*)

Angka pengangguran terbuka di Kota Probolinggo juga mengalami kenaikan. Jumlah angkatan kerja tahun 2021 selama pandemi mengalami kehilangan pekerjaan mencapai 8.572 orang atau 2,45% lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang terdiri dari PHK, dirumahkan dan pemutusan kontrak kerja (*Badan Pusat Statistik 2021, n.d.*). Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja (DPMPTSPK) Kota Probolinggo mencatat sejumlah 758 pekerja dirumahkan, di PHK 30 pekerja dan 375 orang diputus kontrak (*Radar Bromo, 2021*).

Dalam rangka terlaksananya pembangunan nasional, subyek yang paling berpengaruh dalam pembangunan adalah sumber daya manusia (SDM) yaitu tenaga kerja yang memiliki peranan yang begitu besar sebagai aktor dalam pembangunan, sektor yang cukup berpotensi dan berkontribusi dalam upaya peningkatan perekonomian masyarakat yaitu sektor ketenagakerjaan. Tidak hanya itu, aktor pembaharu dan pendorong pembangunan (*development agen*) yakni pemerintah juga dinilai memiliki peranan yang memberikan pengarahan melalui cara-cara yang telah dirancang dengan menggunakan banyak upaya untuk merangsang perkembangan kegiatan sosial ekonomi masyarakat luas (*Pengantar Administrasi Pembangunan / Bintoro Tjokroamidjojo / Perpustakaan Kementerian ATR / BPN, t.t.*)

Berbagai strategi dilakukan oleh pemerintah dalam pemulihan ekonomi masyarakat. Diantaranya dengan penyelarasan program antar stakeholder seperti pada sektor ketenagakerjaan melalui program *cash for work* yang bertujuan untuk membantu masyarakat yang terdampak di era pandemi *COVID-19*. Memberi lapangan kerja secara cepat adalah salah satu jalan dari program *cash for work*. Program *cash for work* merupakan pilihan yang tepat dan logis dengan memberikan kesempatan kepada angkatan kerja yang terdampak untuk terlibat dalam kegiatan konstruktif ringan dan bersamaan memberikan stimulus bagi perekonomian terutama pada situasi pandemi (*Komitmen Kerja Sama dengan Stakeholder untuk Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan Wujudkan Ekonomi Berkelanjutan - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, t.t.*)

Program *cash for work* ini merupakan pengembangan pada program perluasan kesempatan kerja yang mengutamakan pekerja atau buruh yang mengalami kehilangan pekerjaan melalui beberapa kegiatan pembangunan atau pemeliharaan infrastruktur berbasis masyarakat yang telah tercantum dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 177/KPTS/M/2021 Tentang Penetapan Lokasi dan Besaran Bantuan Kegiatan Infrastruktur Berbasis Masyarakat tahun Anggaran 2021. Kelurahan atau desa di wilayah provinsi Indonesia yang berkesempatan mendapatkan program *cash for work* adalah desa atau kelurahan yang memiliki kriteria sesuai dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kepmen PUPR No 177/KPTS/M/2021, 2021).

Pada dasarnya program upaya mitigasi pada sektor ketenagakerjaan yang dikeluarkan pemerintah bukan saja terjadi pada saat pandemi melainkan sejak pasca bencana pemerintah selalu menghadirkan program mitigasi untuk korban bencana dalam rangka membantu meringankan korban yang terdampak. Tentu untuk meninjau keefektifitasannya pun bisa dilihat melalui respon masyarakat yang mendapatkan program pada sektor ketenagakerjaan. Menurut teori Effendy (2003:14) efektivitas adalah proses mencapai tujuan yang ditentukan dan direncanakan sebelumnya dengan disesuaikan pada biaya, waktu, jumlah personil yang ditentukan sebelumnya. Sesuai dengan pernyataan bahwa efektivitas merupakan aspek penting dalam melaksanakan program agar sasaran dan tujuan yang sebelumnya ditetapkan dapat tercapai (Hendyat Soetopo 2012 : 51).

Menurut *Federal Emergency Management Agency* (FEMA), mitigasi merupakan mengurangi dan mencegah resiko atau dampak terjadinya bencana yang melibatkan berbagai pihak yang berperan, yakni pemerintah selaku pembuat kebijakan (*Policy Maker*), dan masyarakat yang berperan sebagai pemangku kepentingan utama (*stakeholders*). Dalam hal mitigasi pandemi bencana non-alam ini sudah seharusnya upaya mitigasi pada sektor ketenagakerjaan ini dilaksanakan oleh pemerintah, keterlibatan masyarakat menjadi kunci utama dari efektivitas mitigasi (*Guide for Business and Industry*, 1993).

Pada tingkat nasional kegiatan program *cash for work* diterapkan pada Papua Barat dimana selama pandemi *COVID-19* jumlah pengangguran di

Papua Barat naik menjadi 9.904 orang dan pemukiman kumuh masih menjadi persoalan yang multi kompleks. Program *cash for work* dilaksanakan di Papua Barat dimana masing-masing kelurahan mendapatkan alokasi dana sebesar 300 juta. Kegiatannya difokuskan pada kegiatan eksisting yang mana penetapan lokasi pada kegiatan adalah lokasi yang terdampak *COVID-19*. (Papua, 2021).

Kemudian pada tingkat Jawa Timur yaitu pada Kota Blitar. Pengangguran di Kota Blitar mengalami kenaikan dari 3.659 menjadi 5.244 jiwa. Kota Blitar juga memiliki kesempatan untuk melaksanakan program *cash for work*. Penanganan masalah kekumuhan di Kota Blitar memerlukan penanganan dengan tepat. Melalui program *cash for work* dapat mengurangi masalah kekumuhan di Kota Blitar. Selain mengurangi kekumuhan program ini juga dapat membantu masyarakat yang mengalami pengangguran akibat pandemi *COVID-19* (Kepanjenlor dan Kepanjen Kidul Kota Blitar Terbaik CFW KOTAKU Se Jatim, 2021).

Pada Kota Probolinggo, penerapan program *cash for work* dilaksanakan di Kelurahan Kebonsari Wetan Kecamatan Kanigaran yang berkesempatan melaksanakan program sebagai wadah bagi masyarakat. Sebelum adanya program *cash for work* program yang menanggulangi masalah limbah dan air bersih serta lingkungan sudah diterapkan namun belum sepenuhnya efektif dalam menangani masalah kekumuhan di Wilayah Kelurahan Kebonsari Wetan. Investasi pendanaan dari APBD dan APBN (Kotaku) merupakan dana yang yang disebar ke lima kecamatan. Dalam pelaksanaannya masyarakat

diberdayakan dan diberi pelatihan mengenai pertukangan bagi pekerja penerima di wilayah sasaran program *cash for work* (Supriyatno, t.t.).

Tabel 1

Ruang Lingkup Pelaksanaan Program Cash For Work

Ruang Lingkup	Pelaksanaan	Lokasi
Nasional	<p>Kegiatan <i>cash for work</i> mampu memanfaatkan kurang lebih 2.479 orang tenaga kerja yang membantu perekonomian masyarakat berpenghasilan rendah selain itu juga mewujudkan permukiman layak huni melalui revitalisasi dalam kegiatan <i>cash for work</i> di Papua Barat. Antusias masyarakat begitu besar meskipun secara umum masyarakat belum paham mengenai program <i>cash for work</i> tersebut.</p> <p>Kelebihan pelaksanaan program CFW pada tingkat nasional ini adalah partisipasi masyarakat dalam keterlibatan aktif masyarakat Papua Barat secara langsung dengan kesadaran dan pertanggung jawaban dari masyarakat dalam kegiatan dan berkontribusi dalam program dari perencanaan, pelaksanaan sampai evaluasi kegiatan program.</p> <p>Kekurangan pelaksanaan program <i>cash for work</i> pada tingkat nasional ini dimana dalam penyusunan tenaga kerja belum dibentuk tim satuan kerja sehingga tidak dapat ber-koordinasi secara kompleks yang merupakan seluruh anggotanya dari Kelurahan. sehingga program ini hanya berjalan begitu saja tanpa adanya pembentukan tim satuan kerja (Papua, 2021).</p>	Papua Barat
Regional	<p>Berdasarkan Badan Pusat Statistik tahun 2021 pengangguran di Blitar mengalami kenaikan yang cukup signifikan yakni naik 2.145 jiwa. Program ini dapat menanggulangi masyarakat pengangguran di Kota Blitar selama pandemi <i>COVID-19</i> dengan menyerap kurang lebih 1.134 tenaga kerja. Selain dapat membantu perekonomian masyarakat Kota Blitar juga merupakan Kota yang melaksanakan program <i>cash for</i></p>	Blitar

	<p><i>work</i> terbaik se-Jawa Timur.</p> <p>Kelebihan pelaksanaan program <i>cash for work</i> pada tingkat regional yaitu Pemerintah Kota Blitar turut serta dalam pelaksanaan program dilihat dari laporan dan anggaran yang dirinci secara detail dalam pengawasan terhadap kegiatan juga dilakukan oleh pemerintah Kota Blitar selama kegiatan berlangsung.</p> <p>Kekurangan dalam hal ini adalah terkait dengan kendala yang dihadapi oleh Pendamping Lokal Desa (PLD) yaitu kurangnya akses bagi PLD kepada desa-desa yang jauh dari jangkauan disebabkan dana transportasi yang kurang (“Kepanjenlor dan Kepanjen Kidul Kota Blitar Terbaik CFW KOTAKU Se Jatim,” 2021).</p>	
Lokal	<p>Tahun 2021 di masa pandemi melalui program KOTAKU memunculkan program <i>cash for work</i> di beberapa kelurahan di Kota Probolinggo untuk membantu perekonomian masyarakat dengan perbaikan infrastruktur ringan yang ditunjukkan kepada masyarakat yang mengalami kehilangan pekerjaan akibat pandemi <i>COVID-19</i>. Salah satu Kelurahan yang berkesempatan untuk melaksanakan program CFW ini adalah Kelurahan kebonsari Wetan.</p> <p>Kelebihan dalam penerapan program ini merupakan media baru dalam bentuk program selama pandemi <i>COVID-19</i> dimana kegiatannya adalah perbaikan atau pemeliharaan rehabilitasi infrastruktur sederhana dengan sumber daya lokal yang tersedia dimanfaatkan dan dioptimalkan melalui pemberdayaan masyarakat dengan memberikan upah tambahan kepada masyarakat.</p> <p>Meskipun begitu terdapat kekurangan dalam program <i>cash for work</i> di Kelurahan Kebonsari Wetan yakni bahwa pelaksanaan program <i>cash for work</i> ini yang hanya diadakan pada saat pandemi <i>COVID-19</i> masyarakat merasakan program ini hanya memberikan pekerjaan untuk sementara waktu saja bagi penerima program setelah kegiatan program ini terealisasi secara keseluruhan masyarakat akan kembali menganggur atau tidak mendapat pendapatan tambahan lagi (Supriyatno, t.t.)</p>	Kelurahan Kebonsari Wetan Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo

Sumber: Diolah Riza Aisyah (2021)

Berdasarkan permasalahan-permasalahan di atas sebelum adanya program *cash for work* pada masa pandemi tidak sedikit masyarakat Kelurahan Kebonsari Wetan yang mengalami PHK maupun pengurangan jam kerja sebab sebagian besar mata pencaharian di Kelurahan Kebonsari Wetan adalah karyawan swasta sebanyak 1093 orang. Hal ini berdampak pada kondisi ekonomi masyarakat dimana pendapatan rumah tangga yang berkurang dengan bersamaan harga berbagai kebutuhan cenderung naik terutama bagi mereka yang bergerak pada sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) sebab pendapatan yang merosot. Hal ini sangat mempengaruhi kinerja perekonomian dan kehidupan masyarakat (Arifin, 2020).

Hasil observasi penemuan sementara dalam program *cash for work* di Kelurahan Kebonsari Wetan pada studi awal di lapangan didapatkan suatu hal yang menarik, yaitu bahwa pelaksanaan program *cash for work* pada masa pandemi *COVID-19* dalam aspek yang berkelanjutan dirasa belum bisa memberikan manfaat secara besar, meskipun dalam pemberian upah tenaga kerja dirasa cukup selain itu juga kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat sebagai pekerja juga dilaksanakan dengan pelatihan tukang tentang cara pembangunan, perbaikan dan pemeliharaan lingkungan sekitar sehingga juga memberikan pengetahuan baru kepada para pekerja namun yang masih disayangkan sebab kegiatan ini tidak berkelanjutan dan hanya bersifat sementara.

Terpilihnya kelurahan Kebonsari Wetan untuk melaksanakan program *cash for work*, karena Kelurahan Kebonsari Wetan merupakan sasaran dari

program KOTAKU sebelumnya. Selain itu Kelurahan Kebonsari Wetan juga memiliki Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) yang telah terbentuk di Kelurahan Kebonsari Wetan sebagai wadah pemberdayaan masyarakat Kelurahan selama pandemi *COVID-19* (Kepmen PUPR No 177/KPTS/M/2021). Adapun kriteria penerima program dan rangkaian kegiatan perbaikan ringan infrastruktur yang dilaksanakan di wilayah Kelurahan Kebonsari Wetan sebagai berikut:

Gambar 1

Prinsip Pelaksanaan dan Kriteria Penerima Program Cash For Work



Sumber: Kelurahan Kebonsari Wetan (2021)

Tabel 2

Daftar Kegiatan Perbaikan Ringan Infrastruktur

No	Kategori Kegiatan	Jenis Kegiatan
1	Sub bidang perbaikan ringan infrastruktur	Perbaikan jalan pada gang
		Pemavingan blok jalan lingkungan dengan konstruksi paving

		Pemasangan bak kontrol
2	Sub bidang kawasan pemukiman	Perbaikan pada saluran drainase atau gorong-gorong pemukiman dan penggantian penutup
		Pengecatan pada gorong-gorong atau marka jalan
		Pengerukan aliran sungai atau pengambilan sendimen
3	Sub bidang pemberdayaan masyarakat	Kegiatan pelatihan, pengadaan pertukangan
		Kegiatan pelatihan kader posyandu dalam pemberian makanan tambahan untuk balita

Sumber: Kelurahan Kebonsari Wetan (diolah penulis), 2021

Kendati demikian, masyarakat juga harus paham tentang program *cash for work*, melalui pemerintah kelurahan kegiatan sosialisasi dilaksanakan sebelum pelaksanaan program terealisasikan kepada masyarakat yang memberikan pengetahuan mengenai kegiatan pemeliharaan pembangunan program KOTAKU yang nantinya pekerja akan diberi upah tenaga kerja baik itu setiap minggu atau setiap hari. Diharapkan melalui program CFW ini memberikan manfaat secara langsung kepada masyarakat dalam bidang lingkungan, sosial maupun ekonomi serta berkontribusi dalam menstabilkan daya beli masyarakat akibat *COVID-19*.

Sedangkan pada penelitian terdahulu menyebutkan bahwa implementasi program padat karya tunai atau *cash for work* mampu menyerap tenaga kerja dan menurunkan tingkat kemiskinan. Pelaksanaannya mulai dari perbaikan infrastruktur hingga pembangunan infrastruktur di desa atau kelurahan yang dananya berasal dari APBD daerah masing-masing yang disesuaikan dengan

kondisi lingkungan sekitar baik digunakan untuk membangun atau merehabilitasi infrastruktur dengan pemberdayaan masyarakat (Dina Fariani, 2019).

Terdapat penelitian terdahulu yang sama dilakukan oleh Jazuli (2021) dengan Judul “Analisis Efektivitas Padat Karya Tunai Dana Desa (Studi Pada Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo)”. Dalam penelitian ini untuk mengukur tingkat efektivitasnya menggunakan indikator yang diuraikan melalui pendekatan sumber (*resource approach*). Dengan menjelaskan pada tujuan yang akan dicapai, strategi atau cara dalam mencapai tujuan, proses dalam perumusan kebijakan, ketepatan dalam menyusun program serta sarana dan prasarana kerja yang memadai. Hasil penelitiannya yaitu, pelaksanaan program berjalan efektif di Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo Tahun 2018 dan 2019.

Kelebihan dari penelitian ini adalah menjelaskan mengenai tingkat efektivitas dengan menguraikan secara jelas setiap indikator dan tidak hanya memaparkan pelaksanaan program padat karya tunai saja namun juga menjelaskan penggunaan dana desa dalam penganggaran program padat karya tunai Namun kelemahan dari penelitian terletak pada tinjauan efektivitas yang belum menjelaskan evaluasi mengenai program padat karya tunai yang dapat menjadi pertimbangan dalam menentukan program kedepan di Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo (Jazuli, 2021).

Penelitian terdahulu kedua yang dilakukan oleh Sofi (2018) yang ditulis dalam bentuk jurnal dengan Judul “Implementasi Padat Karya Tunai Dana

Desa untuk Masyarakat Miskin di Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten Probolinggo”. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode melalui pendekatan prinsip dari pelaksanaan PKT dana desa yang terdiri dari inklusif, partisipatif dan gotong royong, transparan dan akuntabel, efektif, swadaya, prioritas, swakelola, keberlanjutan dan penentuan upah. Hasil penelitian menyatakan bahwa pelaksanaan program padat karya tunai berpengaruh terhadap peningkatan akses infrastruktur pada bidang pendidikan dan kesehatan.

Kelebihan dari penelitian ini yaitu membahas beberapa poin mengenai program PKT dana desa yang terdiri atas perencanaan dan pelaksanaan, pengelolaan keuangan desa, dan kendala dalam menghambat pelaksanaan PKT. Adapun kekurangan dalam penelitian ini hanya membandingkan dua desa di Provinsi Jawa Timur serta tidak menjelaskan dampak dari adanya program padat karya tunai di dua desa tersebut (Sofi, 2020).

Kedua penelitian terdahulu tersebut mengandung sejumlah perbedaan dengan penelitian yang saat ini dilakukan oleh penulis letak perbedaannya adalah meninjau efektivitas program *cash for work* pada kondisi pandemi *COVID-19* di salah satu kelurahan di Kota Probolinggo. Selain itu perbedaannya juga terletak lokasi penelitian dan fokus penelitian dimana pendekatan yang digunakan penulis dalam menjawab dari rumusan masalah penelitian yakni menggunakan pendekatan indikator menurut Teori Sutrisno (dalam Wulandari, 2018:16) yakni, pemahaman program, ketepatan sasaran, ketepatan waktu, tercapainya tujuan, dan perubahan nyata yang akan dibahas lebih

mengacu pada pengetahuan capaian efektivitas *program cash for work* di masa pandemi. Dengan melihat berbagai sumber daya dan proses yang dilaksanakan dengan implikasinya terhadap masyarakat penerima program di Kelurahan Kebonsari Wetan Kota Probolinggo. Oleh karena itu, untuk menciptakan program yang optimal dan memberikan manfaat pada masyarakat perlu partisipasi pemerintah terkait dalam melaksanakan program. Hal ini dapat dilihat dari segi penyusunan rencana kegiatan anggaran, adanya penyelesaian yang baik serta pertanggung jawaban kegiatan berdasarkan lampiran pedoman yang telah dibuat dan menghidupkan kembali fungsi lembaga keswadayaan masyarakat di Kelurahan Kebonsari Wetan Kecamatan Kanigaran kota Probolinggo.

Berdasarkan kajian dari pemaparan diatas dan penelitian terdahulu sebagai acuan oleh peneliti maka dari itu, peneliti mengambil sesuatu yang berbeda dari uraian diatas dan melihat permasalahan dari tingkat nasional dimana pengangguran menjadi masalah yang begitu pelik dan perlu diatasi dengan perhatian pemerintah untuk menurunkan angka pengangguran yang cukup signifikan melalui program *cash for work* yang dikeluarkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Rakyat. Program *cash for work* yang dilaksanakan merupakan media program baru selama pandemi *COVID-19* di Kelurahan Kebonsari Wetan dimana kegiatannya adalah perbaikan atau rehabilitasi infrastruktur sederhana yang melibatkan masyarakat pengangguran sebagai pekerja. Namun dalam hal kegiatan pekerja belum

merasakan hal yang berkelanjutan dalam pemberian upah sebab jika kegiatan sudah selesai masyarakat akan kembali menganggur.

Dari hal ini lah saya tertarik untuk membahas dan melakukan penelitian pada program *cash for work* tahun 2021 pada masa pandemi *COVID-19* di Kelurahan Kebonsari Wetan yang memiliki kesempatan untuk melaksanakan program dari program KOTAKU di Kota Probolinggo dan sebagai wadah masyarakat untuk memberikan upah tambahan. Dapat dilihat dari hasil observasi sementara sebagai studi awal diatas bahwa masyarakat hanya merasakan implikasi yang sementara namun belum menyatakan keefektifan program *cash for work* di Kelurahan Kebonsari Wetan Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo, Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti keefektifan program *cash for work* di masa pandemi *COVID-19* dengan judul penelitian **“Efektivitas Program Cash For Work (CFW) Dalam Kegiatan Infrastruktur Sebagai Upaya Pemerintah Dalam Mitigasi Pandemi COVID-19 (Studi Pada Kelurahan Kebonsari Wetan Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo)”**. Selain itu hal yang menarik untuk diteliti pula adalah efektivitas dari program *cash for work*, yang dimana peneliti belum menemukan paparan studi awal tentang peninjauan efektivitas apakah sudah memberikan implikasi yang cukup atau perubahan yang nyata kepada masyarakat khususnya para pekerja yang mengikuti program *cash for work*. Hal ini perlu diteliti dan dikaji dalam efektivitasnya sebab program ini sudah diimplementasikan cukup lama sehingga yang perlu diteliti adalah mengetahui

penerapan mengenai pelaksanaan program, realisasi kebijakan tersebut, apakah sudah berjalan efektif. Lalu bagaimana implikasi yang ditimbulkan setelah mengimplementasi program tersebut. Maka dari itu, perlu diteliti lebih lanjut untuk memberikan gambaran yang sesuai dengan pendapat masyarakat dan kondisi lapangan serta mengetahui bagaimana pengimplementasian program *cash for work* di masa pandemi *COVID-19* apakah sudah berjalan efektif atau sebaliknya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas maka dapat dirumuskan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana efektivitas program *cash for work* (CFW) dalam kegiatan infrastruktur sebagai upaya pemerintah dalam mitigasi pandemi *COVID-19* pada Kelurahan Kebonsari Wetan Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo?

C. Tujuan Penelitian

Dengan memperhatikan rumusan masalah diatas tujuan sasaran utama yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis efektivitas program *cash for work* sebagai upaya pemerintah dalam mitigasi pandemi *COVID-19* di Kelurahan Kebonsari Wetan.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian diatas, penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangan pemikiran mengenai upaya pemerintah dalam mitigasi pandemi *COVID-19* melalui program *cash for work*.
- b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan terhadap pelaksanaan kebijakan publik.
- c. Penelitian ini diharapkan bisa digunakan sebagai referensi bagi peneliti-peneliti selanjutnya dalam konteks permasalahan sejenis yang berkaitan dengan program *cash for work* atau padat karya tunai.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Universitas Panca Marga Probolinggo

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan tambahan terhadap koleksi dan sumbangan pemikiran dalam pengembangan kajian tentang kebijakan publik sehingga mampu memberikan informasi dan pengetahuan yang lebih luas.

- b. Bagi Pemerintah Kota Probolinggo

Hasil ini dapat menjadi gambaran nyata dan menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah untuk meningkatkan atau

memperbaiki program *cash for work* yang akan dilaksanakan mendatang agar lebih efektif dan efisien.

c. Bagi Masyarakat Umum

Hasil dari penelitian diharapkan mampu memberikan pemahaman terhadap masyarakat agar lebih peka terhadap inovasi pemerintah melalui sebuah program, sehingga masyarakat bisa berperan aktif dalam kegiatan yang diluncurkan oleh pemerintah dalam upaya mitigasi pandemi *covid-19* di tingkat kelurahan.

E. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penulisan, maka serangkain penjelasan yang ada dalam laporan skripsi ini dibagi menjadi beberapa bagian dengan tatanan sistematika berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pendahuluan membahas latar belakang sebagai uraian tentang permasalahan yang diangkat hingga memunculkan perlu dilakukannya penelitian. Rumusan masalah tercantum agar pembahasan tidak keluar dari konteks penelitian. Selanjutnya menjelaskan tujuan dan manfaat dari penelitian ini, terakhir sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan Pustaka terdiri atas penelitian terdahulu sebagai acuan atau referens selanjutnya kerangka dasar teoritik yang berkenaan dengan

penelitian ini, terakhir kerangka pemikiran sebagai alur atau jalannya suatu penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang terdiri dari jenis penelitian yang digunakan, fokus penelitian, lokasi dan situs penelitian, sumber data dan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam kegiatan penelitian selanjutnya instrumen penelitian terakhir analisis data sebagai tahapan untuk menganalisis data yang ditemukan di lapangan.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bagian sub bab ini berisikan secara rinci tentang gambaran umum yang dijadikan sebagai lokasi, selanjutnya penyajian data fokus penelitian yang berguna sebagai analisis dari temuan penelitian baik melalui data yang diperoleh maupun dari hasil observasi dan wawancara mengenai hubungan kualitatif deskriptif terkait efektivitas program *cash for work* di Kelurahan Kebonsari Wetan Kota Probolinggo.

BAB V : PENUTUP

Penutup merupakan akhir dari penulisan dengan menyajikan kesimpulan akhir dari temuan penelitian serta menyampaikan saran secara tidak langsung kepada pihak yang berkaitan dan berkepentingan dengan penelitian.